Bahas Pengembangan Kawasan Bromo, 5 Kementrian Berkunjung ke Kabupaten Pasuruan

Jumat, 12 November 2021

Lima Kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengunjungi Kabupaten Pasuruan untuk membahas pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penyempurnaan pendirian Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOP-BTS), termasuk penentuan wilayah koordinatif dan otoritatif.

Pertemuan dengan Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, membahas kesiapan Pemda dalam mengusulkan lahan-lahan yang akan dijadikan kawasan otoritatif. Pihak Kementerian meminta agar Pemkab Pasuruan memastikan semua lahan tersebut sudah clear and clean, bebas dari masalah status tanah adat, tanah masyarakat, maupun tanah yang dilindungi Undang-Undang.

Pembebasan lahan menjadi fokus utama sebelum usulan diajukan ke Dewan Pengarah. Setelah pembebasan lahan selesai, faktor amenitas seperti ketersediaan hotel, tempat ibadah, dan sarana kenyamanan pengunjung, serta faktor atraksifitas seperti pertunjukan seni budaya dan keindahan alam, juga harus ada di dalam wilayah yang diusulkan.

Bupati Pasuruan menyatakan dukungannya terhadap pembentukan BOP-BTS dan menginstruksikan Asisten dan Kepala OPD terkait untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pembebasan lahan. Pihak Kementerian berharap dengan adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemda, pengembangan Kawasan Bromo Tengger Semeru dapat berjalan lancar dan optimal.

Selanjutnya, rencana pengembangan akan diusulkan ke Gubernur Jawa Timur, kemudian dilanjutkan ke Dewan Pengarah disertai lampiran usulan wilayah koordinatif dan otoritatif. Setelah semua proses selesai, pelaksanaan integrated tourism master plan BTS yang meliputi 4 kabupaten dapat dimulai.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.